

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Efektivitas

1.1.1 Pengertian Efektivitas

Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan kinerja keuangan daerah dan laporan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur salah satunya dengan menghitung rasio-rasio keuangan, diantaranya rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pada ayat 2 dijelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Agustina dalam Pramita (2015:9), kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kata efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Pengertian efektivitas menurut Mahmudi (2015:86) yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* (2015:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya.

Menurut Akhmad (2019:155-156) pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Halim dalam Helly Aroza Siregar (2016:143) efektivitas keuangan pemerintah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Bastian dalam Helly Aroza Siregar (2016:144) efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Artinya kinerja keuangan yang efektif menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik. Dengan kinerja keuangan pemerintah yang efektif maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat.

Untuk rasio sendiri menurut Kasmir (2012:104), Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.

Menurut Halim dalam D. Kartika dan IC. Kusuma (2015:25) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

1.1.2 Ruang Lingkup Efektivitas

Menurut pendapat Muasaroh dalam T Susanti (2016 : 17), efektivitas meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika

tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.

- b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Menurut Sutrisno dalam C Waworuntu (2017 : 5) efektivitas meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

1.1.3 Indikator Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik.

Menurut Kartika dan Kusuma (2015:26) langkah-langkah menghitung rasio efektivitas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data anggaran dan realisasi PAD dari LRA Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2010-2013.
2. Menghitung rasio efektivitas berdasarkan masing-masing tahun anggaran.

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Rumusan rasio efektivitas pengelolaan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 129) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.1)$$

3. Menentukan nilai efektivitas dengan mengacu pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nilai Efektivitas

Kriteria	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤ 60

4. Menganalisis rasio efektivitas yang telah dihitung.

Untuk Rasio Efektivitas, diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan.

1.2. Efisiensi

2.2.1 Pengertian Efisiensi

Pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Tentunya kegiatan yang dilakukan dengan efisien diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo dalam Helly Aroza Siregar (2016:144) efisiensi merupakan perbandingan antara *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Murni (2014 : 6) efisiensi adalah pencapaian output yang

maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Halim dalam Helly Aroza Siregar (2016:143) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan `realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Analisis efisiensi sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan cara yaitu :

- Meningkatkan output untuk input yang sama,
- Meningkatkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input,
- Menurunkan input untuk output yang sama.

“Menurut Yulianti, (2015:12) input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.”

Menurut Julius Tamawiw, Jullie J Sondakh dan Jessy D.L Warongan (2016:105) pemerintah yang dapat mencapai efisiensi keuangan maka akan tersedia dana lebih untuk meningkatkan belanja modal

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisien dibandingkan unit kerja B.

2.2.2 Ruang Lingkup Efisiensi

Menurut (Trianto, 2015:5) efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi nya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Efisiensi dapat dilaksanakan di berbagai sektor, diantaranya:

- Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*), dijelaskan

dengan konsep input output yaitu rasio output dan input.

- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin
- Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi.

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung realisasi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi.

2.2.3 Indikator Efisiensi

Menurut Kartika dan Kusuma (2015:26) langkah-langkah menganalisis rasio efisiensi dalam keuangan daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data total perolehan PAD dan total realisasi PAD
2. Menghitung rasio efisiensi berdasarkan masing-masing tahun anggaran.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut ini rumus untuk menghitung rasio efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.2)$$

3. Menentukan nilai efisiensi terhadap realisasi APBD dengan mengacu pada Keputusan Menteri Daiaam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi	
Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisiensi
>90-100%	Kurang Efisiensi
>80-90%	Cukup Efisien
>60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

4. Menganalisis rasio efisiensi yang telah dihitung.

Pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi

anggaran belanja.

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio ini dihitung melalui perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

1.3. Kemandirian

1.3.1. Pengertian Kemandirian

Menurut Chaplin dalam Ni Fajrin (2015:13), dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata “*independence*” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri.

Menurut Parker dalam Ni Fajrin (2015:14) Kemandirian (*self reliance*) adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah.

Individu yang mandiri tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir, ia bisa bersandar pada diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan bagaimana mengerjakan sesuatu mencapai sesuatu dan bagaimana mengelola sesuatu.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Halim dalam Helly Aroza Siregar (2016:143) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.

“Menurut Mahmudi (2015:140) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”.

Kemandirian keuangan daerah dapat terlihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya dengan menggunakan pendapatannya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian juga sebaliknya.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin tinggi, sehingga dapat juga disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

“Menurut Menurut Akhmad (2019:155) rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber

dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.”

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007 :169) Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

- Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
- Pola hubungan partisipatif, yaitu pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

1.3.2. Ruang Lingkup Kemandirian

Menurut Masrun dalam Ni Fajrin (2015:15) kemandirian mencakup beberapa aspek diantaranya:

- a. Tanggungjawab, yaitu kemampuan memikul tanggungjawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- b. Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan

bukan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.

- c. Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif.
- d. Kontrol Diri, kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.

Menurut Mustafa dalam Ni Fajrin (2015:16) kemandirian memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Mampu menentukan nasib sendiri, segala sikap dan tindakan yang sekarang atau yang akan datang dilakukan oleh kehendak sendiri dan bukan karena orang lain atau tergantung pada orang lain.
- b. Mampu mengendalikan diri, yakni untuk meningkatkan pengendalian diri atau adanya kontrol diri yang kuat dalam segala tindakan, mampu beradaptasi dengan lingkungan atas usaha dan mampu memilih jalan hidup yang baik dan benar.
- c. Bertanggungjawab, yakni kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Dan bertanggungjawab dalam melaksanakan segala kewajiban baik itu belajar maupun melakukan tugas – tugas rutin.
- d. Kreatif dan inisiatif, kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inisiatif sendiri dalam menghasilkan ide – ide baru.
- e. Mengambil keputusan dan mengatasi masalah sendiri, memiliki pemikiran,

pertimbangan, pendapat sendiri dalam mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah sendiri, serta berani menghadapi resiko terlepas dari pengaruh atau bantuan dari pihak lain.

Menurut Parker dalam Ni Fajrin (2015:17) kemandirian mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanggungjawab, yakni memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Individu tumbuh dengan pengalaman tanggungjawab yang sesuai dan terus meningkat. Sekali seorang dapat meyakinkan dirinya sendiri maka orang tersebut akan bisa meyakinkan orang lain dan orang lain akan bersandar kepadanya. Oleh karena itu individu harus diberi tanggungjawab dan berawal dari tanggungjawab untuk mengurus dirinya sendiri.
- b. Indepedensi, yakni merupakan kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada otoritas dan tidak membutuhkan arahan dari orang lain, indepedensi juga mencakup ide adanya kemampuan mengurus diri sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri.
- c. Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri, yakni kemampuan menentukan arah sendiri (self determination) berarti mampu mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dalam pertumbuhannya, individu seharusnya menggunakan pengalaman dalam menentukan pilihan, tentunya dengan pilihan yang terbatas dan terjangkau yang bisa mereka selesaikan dan tidak membawa mereka

menghadapi masalah yang besar.

1.3.3. Indikator Kemandirian

Menurut Kartika dan Kusuma (2015:26) langkah-langkah menganalisis rasio kemandirian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan.
2. Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing tahun anggaran.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Berikut ini rumus untuk menghitung rasio kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer (Dana perimbangan)}} \times 100\% \quad \text{.....(2.3)}$$

3. Menentukan pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) berdasarkan rasio kemandirian. Berikut ini kriteria pola hubungan tingkat kemandirian daerah :

Tabel 2.3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% s.d. 25%	Instruktif
Rendah	> 25% s.d. 50%	Konsultatif
Sedang	>50 % s.d. 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% s.d. 100%	Delegatif

Sumber : Halim 2007

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah.

1.4. Belanja Modal

1.4.1. Pengertian Belanja Modal

Pengertian belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari

dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja modal juga dapat diartikan sebagai biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya.

Menurut Mardiasmo dalam Arumboko (2017:34) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

“Menurut Erlina dan Rasdianto dalam Arumboko (2017:34) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.”

Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229). Dalam hal ini belanja modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi belanja modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga.

“Menurut Feri Prastyo Setiawan (2019:30) peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) dalam publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang

akan datang, yaitu berdampak pada produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.”

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum pemerintah daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

“Menurut Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan

anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

“Menurut Darise dalam Wahyuni (2019 : 9), belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.”

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang banyak digunakan sebagai acuan studi pembangunan adalah teori Harrod-Domar. Konsep pokok dalam teori ini adalah Capital Output Ratio (COR), dimana untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal. akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Kemudian Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah-daerah yang dimiliki.

“Menurut Feri Prastyo Setiawan (2019:31) belanja modal jenis pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi

yang ditujukan untuk peningkatan saran dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal, jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instansi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat buku/perpustakaan, barang kesenian budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.”

Menurut Julius Tamawiw, Jullie J Sondakh dan Jessy D.L Warongan (2016:104) belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan kinerja keuangan daerah diantaranya:

- (1) Pendapatan Asli Daerah
- (2) Desentralisasi fiskal
- (3) Efektivitas keuangan daerah
- (4) Efisiensi keuangan daerah

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan pengungkapan belanja pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.

2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya.

1.4.2. Ruang Lingkup Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama sebagai berikut :

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja modal fisik lainnya juga termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku- buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Mardiasmo dalam Arumboko (2017:34) belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja modal memiliki beberapa peranan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

1.4.3. Indikator Belanja Modal

Nilai belanja modal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Pengeluaran Kabupaten dan Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Indikator belanja modal dapat dilihat dengan mengukur rasio belanja modal dengan cara membandingkan jumlah belanja modal dengan total belanja pada tahun anggaran masing-masing.

“Menurut Mahmudi dalam Wirawan Suhaedi (2019 : 69) analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin,

pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.” Rasio belanja modal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.4)$$

“Menurut Halim dalam Wahyuni (2019:14) ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Dalam hal ini belanja modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi belanja modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.”

Untuk proporsi belanja modal yang ideal, penulis belum menemukan teori yang membahas secara spesifik terkait berapakah persentasi belanja modal yang ideal dalam suatu pemerintahan. Penulis hanya menemukan jumlah persentase belanja infrastruktur yang dihimbau oleh pemerintah Jokowi Widodo.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, jumlah belanja infrastruktur yang diharapkan dapat dipenuhi oleh suatu daerah yakni sebesar 25% dari DTU (Dana Transfer Umum).

Menurut teori-teori yang dikemukakan sebelumnya, secara teoritis belanja modal dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi pelayanan publik untuk masyarakat serta tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga.

2.5 Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait pengaruh efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal yang penulis deskripsikan pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Penelitian yang Relevan

No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kurni Adi Suwandi Afrizal Tahar (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Uji Asumsi Klasik 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Derajat Desentralisasi Dan Rasio Ketergantungan Keuangan • Variabel Y Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi • Metode penelitian dengan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Ketergantungan Fiskal Memiliki Pengaruh Negatif Pada Alokasi Belanja Modal • Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Memiliki Pengaruh Positif Pada Alokasi Belanja Modal • Rasio Kontribusi BUMD Derajat Tidak Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. 	Jurnal InFestasi Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 118 - 136
2.	D. Kartika, Kusuma (2015) Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi Laporan Realisasi (APBD) Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Analisis Rasio 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada variabel Y - Metode deskriptif - Tidak ada uji asumsi klasik da uji regresi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Tergolong Sangat Rendah Dengan Menunjukkan Pola Hubungan Instruktif. • Rasio Efektivitas PAD Tergolong Sangat Efektif. 	Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 No. 2, Des 2015
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber

3.	Raja Assyurriani (2015) Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Uji asumsi klasik • Analisis Regresi Data Panel • Metode Statistik deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Tingkat Kemandirian Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efektifitas, Rasio Aktifitas, Rasio Pertumbuhan Secara Bersamaan Berpengaruh Terhadap Belanja Modal. • Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal. • Rasio Efektifitas Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal. • Rasio Efisiensi Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal. 	Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2015
4.	Sylvia Febriany Gerungan David P.E. Saerang Winston Pontoh (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Metode data kuantitatif • Uji asumsi klasik • Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan Keuangan Daerah, Kecerassian Belanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Simultan Variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas Pad, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, Dan Kecerassian Belanja Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal. • Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Efektivitas Belanja Daerah Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal 	Jurnal Riset Akuntan-si Dan Auditing "Goodwill" Vol 6, No 1 (2015)
5.	I Ketut Arsal Nyoman Djinar Setiawina (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 – 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Belanja Modal • Metode survei/sam-pel jenuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Derajat Desentrali-sasi Ketergantungan Keuangan • Analisis jalur (path analysis) dengan Program Eviews 	<ul style="list-style-type: none"> • Derajat Desentralisasi Dan Efektifivitas Berpengaruh Positif Pada Belanja Modal • Ketergantungan Keuangan Berpengaruh Negatif Pada Belanja Modal. • Alokasi Belanja Modal Berpengaruh Positif Pada Ketergantungan Keuangan 	Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 104 No. 2, Agustus 2015
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber

6.	Helly Aroza Siregar (2016) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Belanja Modal • Metode deskriptif kuantitatif • Uji Asumsi Klasik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi • Analisis regresi linear berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Fiskal Dan Efisiensi Keuangan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi • Efektifitas Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau. • Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Tidak Dapat Dijadikan Variabel Moderasi Dalam Penelitian Ini Karena Rasio Belanja Modal Ini Tidak Dapat Memperkuat Hubungan Antara Kemandirian Fiskal, Efektifitas Dan Efisiensi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau. 	Jurnal AkuntansiKewirausahaan dan Bisnis.Vol1 No. 1, Juni 2016. STIE Pelita Indonesia e-ISSN 2527-8215
7.	Nadya Ayu Delima, Taufiq Marwa Dan Anna Yulianita (2016) Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Di Sumatera Bagian Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Menggunakan data sekunder • Analisis regresi data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektifitas Berpengaruh Siginifikan Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik. • Rasio Efisiensi Berpengaruh Siginifikan Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik. • Rasio Kemandirian Daerah Tidak Berpengaruh Siginifikan Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik 	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14 (2): 69-78, Desember 2016. Universitas Sriwijaya p-ISSN: 1829-5843
8.	Julius Tamawiyw Jullie J Sondakh Jessy D.L Warongan (2016) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kab. Kota Di Prov. Sulawesi Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Belanja Modal • Uji Asumsi Klasik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PAD, Desentralisasi Fiskal • Metode dokumentasi dengan judgment sampling • Analisis regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PAD Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal. • Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Belanja Modal. • Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Belanja Modal. 	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" No 2 (2016). Universitas Sam Ratulangi
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber

9.	Dinarossi Dan Darma (2016) Pengaruh Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efisiensi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal Metode 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas • Uji spesifikasi model • Regresi berganda dengan model estimasi Fixed Effect 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Keseluruhan Variabel Efisiensi Keuangan Daerah Dan Variabel Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal 	Jurnal Adminika Volume 2. No. 2, Juli Desember 2016
10.	Eko Indra Praza (2016) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Analisis regresi data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Derajat Desentrali-sasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Rasio Derajat Kontribusi BUMD • Data time series dan cross section 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal • Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal. • Rasio Efektifitas PAD Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal. 	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1 (2016): p-ISSN: 2338-4603 e-ISSN: 2355-8520
11.	Alamsyah Sutedja, Ardi (2016) Pengaruh Rasio Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Metode deskriptif kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Uji analisis regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal. • Rasio Kemandirian Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal • Rasio Efektivitas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal • Rasio Efisiensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal 	Tesis, UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2016
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber

12.	Dini Mulyani, (2017) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal tahun Anggaran 2013-2015 Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Belanja Modal	Kapasitas Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Kapasitas Fiskal Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 	Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
13.	Linawati, Suhardi (2017). Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Moderasi Alokasi Belanja Modal.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Belanja Modal Metode deskriptif kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi Analisis Moderated Regression Analysis 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kinerja Keuangan Dengan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Alokasi Belanja Modal Berpengaruh Signifikan Dalam Memoderasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 	Jurnal Ekuivalens, Program Studi Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Vol 3 No 2 (2017).
14.	M. Zulkarnaen (2017) Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal Metode sampling jenuh Uji Asumsi Klasik 	Rasio Keserasian Belanja Dan Rasio Belanja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja Dan Rasio Belanja Pegawai Secara Simultan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Belanja Modal. Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja Dan Rasio Belanja Pegawai Signifikan Terhadap Belanja Modal, Sedangkan Rasio Efektivitas Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Belanja Modal. 	Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
15.	Muhammad Arif	<ul style="list-style-type: none"> Rasio 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> Kemandirian Keuangan 	Tesis

	(2018) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017	Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Metode sampling jenuh • Regresi data panel	Keserasian	Daerah Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah • Efektivitas PAD Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah • Efisiensi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah • Keserasian Belanja Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah	Universitas Negeri Padang.
16.	Linawati, Mar'atus Solikah Badrus Zaman (2018) Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Kediri	• Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Metode sampling jenuh	• Pertumbuhan Ekonomi, • Analisis MSEM (Moderating Structural Equation Modeling)	• Kinerja Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Yang Tidak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi • Alokasi Belanja Modal Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien Path Yang Positif Menunjukkan Bahwa Semakin Baik Alokasi Belanja Modal Maka Pertumbuhan Ekonomi Akan Semakin Meningkatkan • Variabel Moderator Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Atau Dapat Dikatakan Bahwa Alokasi Belanja Modal Dapat Menjadi Variabel Moderator Dari Pengaruh Antara Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Majalah Ekonomi _ ISSN No. 1411-9501 _ Vol. XXIII No. 1_Juli 2018
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
17.	Ni Made Deni Indiyanti1, Henny	• Rasio Efektivitas,	• Rasio Derajat Desentrali-	• Kinerja Keuangan Daerah Yang Diukur Dengan Rasio	E-Jurnal Manajemen

	Rahyuda (2018) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali	Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal	Sasi Fiskal, Tingkat Pembiayaan Silpa, Dan Derajat Kontribusi BUMD • Metode kuantitatif asosiatif • Analisis regresi linear berganda	Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan Silpa, Dan Derajat Kontribusi BUMD Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal • Kinerja Keuangan Daerah Yang Diukur Dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Efisiensi Keuangan Daerah Berpengaruh Negatif Tidak Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal.	Unud, Vol. 7, No. 9, 2018: 4713-4746
18.	Christina Irwati Tanan, Jimmi Ari Duri (2018) Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)	• Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Menggunakan data sekunder • Analisis Ratio	Kontribusi PAD, Rasio Ketergantungan, Belanja Modal, Kontribusi BUMD,	• Kontribusi PAD Masih Dalam Kategori Rendah Sekali. • Rasio Ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura Terhadap Pemerintah Pusat Semakin Menurun Tetapi Masih Dalam Kategori Tinggi • Rasio Kemandirian Masih Rendah Sekali Dan Perlu Ada Upaya Untuk Meningkatkan Kemandiriannya Terhadap Penerimaan Transfer Pusat. • Rasio Efektifitas Menunjukkan Hasil Sangat Efektif Karena Pencapaian Realisasi PAD Diatas Target Yang Ditetapkan. • Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Jayapura Masuk Dalam Kriteria Sangat Efisien • Kontribusi Yang Diperoleh Dari Penerimaan BUMD Masih Tergolong Kecil Terhadap Total Penerimaan Daerah	Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 6 (1): 91 - 101, September 2018
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
19.	Rinta Seftyawati Putri, Sri Rahayu (2019) Pengaruh	• Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi	• Derajat Desentrali-sasi Daerah,	• Kinerja Keuangan Berupa Derajat Desentralisasi Daerah, Kemandiran Keuangan	Jasa (Jurnal Akuntansi, Audit dan

	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris Pada Kota/Kabupa-Ten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)	Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel 	Kontribusi BUMD <ul style="list-style-type: none"> • Metode kuantitatif dengan purposive sampling 	Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Dan Kontribusi BUMD Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Belanja Modal. <ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial, Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Dan Efisiensi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal. • Sedangkan Derajat Kontribusi BUMD Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal. 	Sistem Informasi Akuntansi) Vol. 3 No. 2 /Agustus 2019
20..	Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, Erni Wiriani (2019) Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal • Menggunakan data sekunder • Uji asumsi klasik - 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Langsung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektivitas Bernilai Positif Terhadap Belanja Modal • Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. • Hasil Uji F Pada Sub Struktur I Secara Simultan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal • Pada Sub Struktur II Secara Simultan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Belanja Modal Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Langsa 	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No. 1, April 2019
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
21..	Joni Kristian, Firdi Yanto, Susi Astuti (2020) Pengaruh Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Structural Equation 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan 	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen,

	Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data sekunder 	Modelind (SEM) dengan program Partial Least Square (PLS), pengujian Convergent Validity	Ekonomi	Bisnis dan Akuntansi 2(3) Juni tahun 2020
22.	Nasrullah Dali, Santiadji Mustafa, Alifamin Farham (2020) Pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> PAD Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Belanja Modal Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Secara Simultan Berpengaruh Dan Signifikan Terhadap Belanja Modal 	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume V/1/Februari 2020
23.	M. Arif dan Fefri Indra Arza (2019) Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio keserasian belanja Statistik Deskriptif Analisis Regresi Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik,. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. 	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri A, Februari 2019, Hal 35-49 ISSN : 2656-3649
No	Peneliti (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
24.	Nofik Taufik Muharam (2020) Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio efektivitas berpengaruh negative dan tidak significant terhadap pertumbuhan ekonomi Rasio Efisiensi keuangan 	Tesis Universitas Siliwangi tahun 2020

	Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Metode survei • Uji Asumsi Klasik • Regresi Data Panel 		daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 	
--	--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan pembangunan daerah diantaranya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah ini dapat terlihat dari rasio-rasio keuangan daerah masing-masing. Dalam penelitian ini penulis tertarik membahas tentang pengaruh efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Faktor yang mendorong penulis untuk meneliti tema diatas yaitu masih rendahnya belanja modal jika dibandingkan dengan total belanja di Provinsi Jawa Barat khususnya.

Menurut pemikiran penulis apabila suatu daerah memiliki kinerja keuangan yang bagus yang tercermin dalam rasio- rasio keuangan, diantaranya efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah, maka seharusnya dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap besarnya belanja modal didaerah tersebut yang tentunya akan meningkatkan pelayanan publik dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal infrastruktur. Hal tersebut merupakan alasan penulis mengambil judul pengaruh efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

Untuk variabel pertama yang diteliti penulis yaitu efektivitas. Menurut

Mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Julius Tamawiw, Jullie J Sondakh dan Jessy D.L Warongan (2016:104) belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan kinerja keuangan daerah diantaranya:

- (1) Pendapatan Asli Daerah
- (2) Desentralisasi fiskal
- (3) Efektivitas keuangan daerah
- (4) Efisiensi keuangan daerah

Menurut Kurni Adi Suwandi dan Afrizal Tahar (2015:118) rasio efektivitas memiliki pengaruh positif pada alokasi belanja modal. Nadya Ayu Delima, Taufiq Marwa, dan Anna Yulianita (2016:80) juga mengungkapkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik.

Semakin besar efektifitas atau pencapaian target, maka alokasi belanja modal untuk pelayanan publik juga semakin besar. Rasio efektifitas atau pencapaian target Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kinerja keuangan daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, jika pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun lalu melampaui target maka target untuk tahun berikutnya harus ditingkatkan

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Anita G Saragih (2018:58) yang menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Rinta Seftyawati Putri dan Sri Rahayu (2019:266) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal yang artinya peningkatan atau penurunan pada rasio efektivitas setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada belanja modal. Penelitian M. Zulkarnain (2017:104) juga menemukan efektivitas memiliki pengaruh langsung yang bersifat positif terhadap belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Arif dan Fefri Indra Arza (2018:31) yang menyatakan bahwa efektivitas secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Variabel selanjutnya diteliti yakni efisiensi. Menurut Mardiasmo dalam Helly Aroza Siregar (2016:144) efisiensi merupakan perbandingan antara *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Anggriani dalam Yeni Widyawati (2020:149) efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yakni perbandingan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya (input) yang digunakan.

Menurut Trianto, (2015:5) efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input.

Menurut Julius Tamawiw. Jullie J Sondakh dan Jessy D.L Warongan (2016:105) pemerintah yang dapat mencapai efisiensi keuangan maka akan tersedia dana lebih untuk meningkatkan belanja modal.

Menurut Nadya Ayu Delim, Taufiq Marwa dan Anna Yulianita (2016:82) efisiensi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Artinya semakin efisien daerah maka kemampuan belanja modal menjadi lebih besar.

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Muhammad Arif (2018: 33) yang menemukan bahwa efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan positif terhadap belanja modal. Penelitian Rinta Seftyawati Putri dan Sri Rahayu (2019:265) juga menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Muhammad Arif dan Fefri Indra Arza (2018:31) menyatakan bahwa efisiensi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah.

Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ni Made Deni Indiyanti1, Henny Rahyuda (2018) yang menyatakan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Untuk variabel selanjutnya yakni kemandirian. Menurut Chaplin dalam Ni Fajrin (2015:13), dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata “independence” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri.

Halim dalam Helly Aroza Siregar (2016:143) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

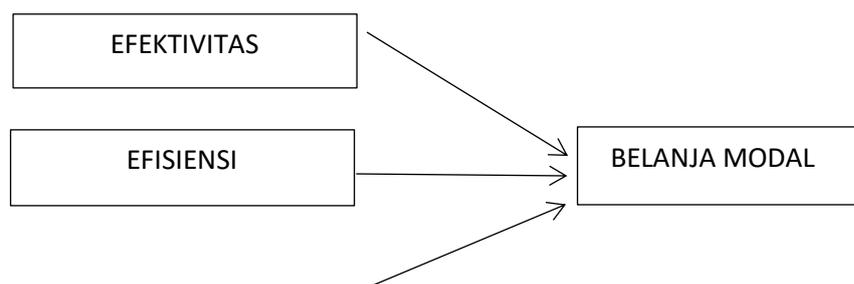
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.

Menurut Rinta Seftyawati Putri dan Sri Rahayu (2019 : 265) rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan atau penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada belanja modal.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yakni penelitian M. Zulkarnain (2017:109) secara simultan variabel-variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio belanja pegawai terhadap berpengaruh belanja modal.

Senada dengan penelitian Nasrullah Dali, Santiadji Mustafa, Alifamin Farham (2020:41) bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Arif dan Fefri Indra Arza (2018:31) yang menyatakan kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran mengenai pengaruh efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal dapat penulis gambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang relevan, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah: efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal baik secara parsial maupun simultan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.